

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1. Latar Belakang Masalah**

Semenanjung Korea menjadi salah satu wilayah yang tidak luput dari sejarah dunia. Korea adalah negara semenanjung di bagian timur laut dari benua Asia (Wilson, 2002). Sebelum Jepang menduduki Semenanjung Korea, Korea adalah wilayah kesatuan dan merupakan negara otonom (Macdonald, 1996). Dalam Perjanjian Aneksasi Jepang-Korea secara resmi Jepang menduduki Korea pada tahun 1910. Kemunculan perjanjian tersebut menjadi awal mula kekuasaan Jepang secara de facto di Korea. Isi perjanjian tersebut menyatakan bahwasanya terjadi penggabungan antara Jepang dan Korea. Melalui perjanjian tersebut ditemukan fakta bahwasanya Kaisar Korea, Yung-hui menolak perjanjian tersebut, namun atas paksaan para menteri yang telah disuap oleh Jepang dengan terpaksa Yung-hui menyetujui perjanjian (Anonim, Media Indonesia Web site, 2017). Pasca Perang Dunia II selesai serta kekalahan Jepang terhadap sekutu, Korea mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1945. Di tahun yang sama dengan kemerdekaannya, Semenanjung Korea resmi terbagi menjadi dua wilayah kedaulatan, yaitu Korea Utara dengan nama resmi Republik Demokratik Rakyat Korea (RDRK) dan Korea Selatan dengan nama resmi Republik Korea.

Perpecahan Semenanjung Korea juga tidak terlepas dari peran Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kehadiran ideologi Liberalisme dan Komunisme yang di bawa oleh dua negara *super power* tersebut menjadi faktor lain pecahnya bangsa Korea. Tentara militer Uni Soviet membangun rezim Komunisme di area Utara dengan garis lintang 38° Utara (Pruitt, 2018). Sementara di garis lintang Selatan, Amerika Serikat membangun pemerintahan militer dengan membawa rezim anti-komunisme atau dikenal sebagai ideologi Liberalisme. Secara politik, kemunculan Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1947 memperkuat perbedaan ideologi antara Korea Selatan dan Korea Utara. Tahun 1948, Kota Seoul di bawah kepemimpinan Syngman Rhee menerapkan pro-Amerika dan menggunakan sistem demokrasi, sementara itu Kota Pyongyang di bawah kepemimpinan Kim Il-Sung mengaplikasikan rezim Komunisme (Alonso, 2019). Perbedaan ideologi yang dimiliki oleh kedua negara nyatanya menciptakan ketegangan hubungan antara dua negara Korea. Kedua negara Korea masing-masing mempertahankan ideologi yang mereka percayai, sehingga menciptakan situasi yang semakin tidak kondusif. Perbedaan ideologi kedua negara menjadi akar munculnya gesekan antara Korea Selatan dan Korea Utara dan pada akhirnya menciptakan sebuah konflik besar yang dikenal sebagai Konflik Semenanjung Korea pada tahun 1950.

Faktor lain yang menjadi alasan Konflik Semenanjung Korea pecah adalah tindakan militer Korea Utara yang dengan sengaja menyeberangi perbatasan dan melakukan invasi ke Korea Selatan pada 25 Juni 1950 (Muhammad, 2016, hal. 127).

Aksi yang dilakukan oleh Korea Utara tersebut menjadi pemicu pecahnya Perang Korea di tahun yang sama. Tiga tahun sejak Perang Korea berlangsung, muncul kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani oleh Amerika Serikat, China, dan Korea Utara. Kesepakatan tersebut menjadi faktor dibuatnya zona perbatasan antara kedua negara Korea yang dikenal sebagai Zona Demiliterisasi (DMZ). Alasan pembuatan Zona Demiliterisasi (DMZ) di kawasan Semenanjung Korea karena sejak perpecahan Semenanjung Korea, wilayah Korea Selatan dan Korea Utara secara resmi tidak memiliki batas wilayah kekuasaan. Hal tersebut menyebabkan kedua negara bersitegang dimana masing-masing negara kerap mengklaim wilayah kekuasaan. Kehadiran zona perbatasan Semenanjung Korea atau Zona Demiliterisasi membagi wilayah Semenanjung Korea secara resmi. DMZ juga berfungsi sebagai kawasan *buffer zone* bagi Korea Selatan dan Korea Utara di bawah Perjanjian Gencatan Senjata yang ditandatangani pada tahun 1953 (Park, 2018).

Dinamika hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara mengalami pasang surut pasca pecahnya Perang Korea. Pecahnya Perang Korea pada tahun 1950 berhasil menciptakan keretakan hubungan antara kedua negara Korea. Kedua negara dalam beberapa tahun berada di dalam situasi yang tidak kondusif pasca Perang Korea tahun 1950. Dua puluh tahun sejak pecahnya Perang Korea, kedua negara Korea mulai mencoba untuk membuka komunikasi. Pada tahun 1970, hubungan diplomatik kedua negara Korea untuk pertama kalinya dilaksanakan. Hubungan diplomatik antar kedua negara dimulai saat disepakatinya deklarasi “Penyatuan Kembali

Negara Secara Damai” yang melibatkan kedua negara Korea. Deklarasi yang disepakati oleh Korea Selatan dan Korea Utara menyatakan bahwa kedua negara telah mengakui pemerintahan masing-masing dibuktikan dengan seruan Korea Selatan untuk melakukan kejujuran dalam kompetensi perdamaian dengan Korea Utara (Darmono, 2001, hal. 46). Berangkat dari deklarasi tersebut, kedua negara mulai melakukan berbagai macam perundingan, salah satu contohnya pada tahun 1971, kedua negara Korea melakukan perundingan bernama “Pernyataan Bersama antar Korea”.

Pada tahun 1990-an, Semenanjung Korea dikejutkan dengan aksi pengembangan nuklir oleh Korea Utara. Kehadiran nuklir di Korea Utara menambah ketegangan antara kedua negara dan dinilai sangat mengkhawatirkan. Korea Utara yang merencanakan program perkembangan nuklir dinilai tidak transparan, sehingga memperparah situasi Semenanjung Korea saat itu. Korea Utara percaya bahwa program perkembangan nuklir tersebut akan membawa Korea Utara sebagai negara yang kuat dan makmur (Clement Walter C., 2010, hal. 127-154). Perkembangan program nuklir Korea Utara nyatanya menambah ketegangan hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong Un beberapa kali melakukan aksi provokatif. Aksi provokatif tersebut dilakukan oleh Korea Utara dengan melakukan uji coba rudal dan program nuklir sehingga ketegangan antara Korea Selatan dan Korea Utara semakin meningkat. Bagi Korea Selatan dan negara lainnya, aksi provokatif Korea Utara tersebut bersifat mengancam keamanan dan memperkeruh suasana. Selain mengancam

keamanan, nuklir Korea Utara juga berdampak pada hubungan komunikasi kedua negara. Salah satunya ditandai dengan putusnya komunikasi militer antara Korea Selatan dan Korea Utara pada tahun 2016. Putusnya komunikasi tersebut ditandai dengan penutupan wilayah industri Kaesong oleh Korea Selatan (Lisbet, 2018, hal. 9).

Dinamika hubungan kedua negara Korea bukan menjadi suatu penghalang bagi Korea Selatan dan Korea Utara untuk mengadakan sebuah pertemuan. Kedua negara Korea beberapa kali mengadakan pertemuan antara kedua negara yang membahas terkait reunifikasi Korea. Meskipun ketegangan sering terjadi di antara kedua negara, kedua negara juga memiliki hubungan baik dalam beberapa waktu khususnya pada acara-acara penting, salah satunya acara keolahragaan. Kompetisi keolahragaan internasional menjadi sarana beberapa negara sebagai ajang untuk melakukan perdamaian dengan negara lainnya. Keolahragaan internasional menjadi salah satu sarana bagi Korea Selatan dan Korea Utara sebagai upaya kedua negara untuk melakukan perdamaian. Tegangnya situasi kedua negara dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan hubungan diplomatik kedua negara mengalami kerenggangan yang semakin lebar. Kedua negara Korea beberapa kali memanfaatkan momentum olimpiade sebagai alat kedua negara untuk menuntaskan konflik Semenanjung Korea. Salah satunya melalui pelaksanaan olimpiade musim dingin.

Olimpiade musim dingin adalah sebuah kompetisi olahraga yang dilakukan empat tahun sekali. Olimpiade Musim Dingin merupakan salah satu jenis olimpiade yang hadir di dunia. Olimpiade Musim Dingin diadakan pada bulan Februari saat

musim dingin. Olimpiade Musim Dingin menjadi kompetisi internasional bergengsi karena sembilan puluh dua negara ikut berpartisipasi dalam olimpiade ini (Anonim, 2018). Olimpiade Musim Dingin bukan sekedar ajang kompetisi olahraga, namun olimpiade ini merupakan kompetisi yang memiliki esensi yang kuat dan memiliki banyak makna seperti sikap saling menghargai, toleransi, semangat universalitas, dan kerjasama (Herdinata, 2019, hal. 66). Salah satu olimpiade musim dingin yang membawa esensi tersebut adalah Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018. Melalui Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018, esensi yang ditawarkan oleh olimpiade musim dingin terlihat jelas selama pelaksanaan Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018. Sikap-sikap yang menjadi esensi olimpiade musim dingin dihadirkan selama Olimpiade Pyeongchang 2018 berlangsung dengan melibatkan langsung negara Korea Selatan dan Korea Utara.

Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 menjadi tahun bersejarah bagi Korea Selatan dan Korea Utara dimana kedua negara kembali berdiri bersama di bawah bendera unifikasi pada ajang olahraga internasional. Hal tersebut menjadi salah satu moment perdamaian bagi kawasan Semenanjung Korea. Sebelumnya, kedua negara Korea pernah bersatu di bawah bendera unifikasi Korea dalam beberapa ajang olimpiade. Pada tahun 2000 di ajang Olimpiade Sydney, Korea Selatan dan Korea Utara bergabung di bawah bendera unifikasi Korea. Kedua negara pada upacara pembukaan bersatu dan berjalan bersama di bawah bendera unifikasi Korea. Selain Olimpiade Sydney tahun 2000, Olimpiade Athena di tahun 2004 kembali menjadi saksi kedua negara bersatu dan

berjalan kembali di bawah bendera unifikasi Korea. Dalam ajang Olimpiade Turin di Italia pada tahun 2006 kedua negara Korea kembali bersatu. Tidak jauh berbeda dengan peristiwa sebelumnya, dalam sesi upacara pembukaan Korea Selatan dan Korea Utara kembali berada di bawah bendera unifikasi.

Berangkat dari moment bersatunya Korea Selatan dan Korea Utara dalam beberapa ajang olimpiade, membuktikan bahwa keberadaan olimpiade musim dingin dihadirkan sebagai sarana perdamaian dengan mengedepankan esensi yang dimiliki oleh olimpiade musim dingin. Disisi lain, keberadaan Olimpiade Musim Dingin 2018 sebagai olimpiade perdamaian semakin terlihat nyata karena untuk pertama kalinya terbentuk tim gabungan antar Korea. Tim gabungan tersebut terjadi pada cabang olahraga hoki khususnya pada pertandingan hoki es wanita. Pembentukan tim gabungan hoki es wanita kedua negara menggambarkan terjadinya hubungan positif antara kedua negara Korea di tengah situasi yang kurang baik. Tim gabungan hoki es wanita Korea juga menyerukan kepada dunia internasional bahwa pelaksanaan Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 menjadi istimewa dan bersejarah karena pada olimpiade yang pernah terjadi, kedua negara Korea tidak pernah memiliki tim gabungan.

Pelaksanaan Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 juga menjadi salah satu wujud upaya diplomasi Korea Selatan dan Korea Utara. Diplomasi tersebut diwujudkan dalam bentuk *sport diplomacy* yang bertujuan untuk meredakan persoalan di Semenanjung Korea. Dibuktikan dalam *White Paper Diplomacy* Korea Selatan bahwa penyelenggaraan Olimpiade Musim

Pyeongchang 2018 adalah upaya diplomasi dan dimanfaatkan sebagai kesempatan dalam menuntaskan persoalan nuklir dan mencapai perdamaian bangsa Korea (Kementerian Luar Negeri Republic of Korea, 2018). Sementara upaya diplomasi Korea Utara sebagai negara satu rumpun Korea Selatan dilakukan dengan beberapa kali menyetujui pertemuan kedua negara untuk membahas perdamaian di Semenanjung Korea. Selain membahas tentang upaya perdamaian kedua negara, Korea Utara juga setuju untuk ikut bergabung dalam ajang Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 dengan mengirimkan beberapa perwakilan negara.

## **1. 2. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang permasalahan yang diangkat oleh penulis, rumusan masalah yang akan diambil oleh penulis yaitu :  
“Bagaimana Olimpiade Pyeongchang 2018 dapat digunakan untuk meredakan ketegangan antara Korea Selatan dan Korea Utara?”



## **1. 3. Kajian Teori**

### **1. 3. 1. Diplomasi Kebudayaan**

Diplomasi dikenal sebagai upaya perundingan atau negosiasi. Diplomasi juga dikenal sebagai salah satu cara sebuah negara untuk mengelola hubungan antar bangsa, baik di tengah situasi baik ataupun buruk (Tulus Warsito & Wahyuni Kartikasari, 2007). Diplomasi menjadi salah satu upaya yang kerap dilakukan oleh beberapa negara untuk mencapai perdamaian. Diplomasi sangat berkaitan erat dengan kebijakan luar negeri karena kehadiran diplomasi merupakan wujud dari kebijakan luar negeri itu sendiri (Herdinata, 2019, hal. 65). Menurut Djelantik, diplomasi pada dasarnya dilakukan oleh seseorang yang sudah terlatih (Djelantik, 2008). Kemunculan diplomasi dalam kurun waktu ke waktu mengalami perkembangan dan perubahan. Beberapa waktu lalu, diplomasi dikenal sebagai proses negosiasi antar negara dengan negara, namun dewasa ini proses diplomasi telah berkembang dengan melibatkan beberapa aktor non-negara. Dalam Ilmu Hubungan Internasional, terdapat beberapa jenis diplomasi yang hadir pada saat ini. Salah satunya adalah kehadiran diplomasi kebudayaan. Diplomasi kebudayaan menjadi salah satu bagian penting dalam aktifitas diplomasi dari semua negara pada era ini.

Pada awal kemunculannya, diplomasi kebudayaan merupakan

instrumen dalam suatu kebijakan luar negeri suatu negara untuk mengimplementasikan sebuah ide dengan menggunakan budaya sebagai sebuah kepentingan dalam mempromosikan kebijakan luar negeri. Diplomasi kebudayaan merupakan implementasi dari *soft power* suatu negara. Penggunaan *soft power* saat ini sering dilakukan oleh beberapa negara dibandingkan dengan penggunaan *hard power*.

Diplomasi kebudayaan adalah upaya suatu negara dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui sarana kebudayaan, baik melalui ilmu pengetahuan, pendidikan, kesenian, dan olahraga atau upaya suatu negara mempertahankan kepentingan nasional melalui propaganda dan lainnya (Sutantri, 2018, hal. 31). Diplomasi kebudayaan juga menekankan jika kehadiran diplomasi tersebut sebagai objek utama untuk mempromosikan sikap saling pengertian antar negara dibandingkan mengejar sebuah kepentingan dalam kebijakan luar negeri. Menurut M.C. Cummings, ia mendefinisikan diplomasi kebudayaan sebagai “*pertukaran ide, informasi, seni, dan aspek budaya lainnya di antara bangsa-bangsa dan rakyatnya untuk menumbuhkan rasa saling pengertian*” (Cummings, 2003, hal. 1). Diplomasi kebudayaan dapat dilakukan oleh sektor swasta, publik, bahkan masyarakat sipil. Pendapat umum pada level nasional maupun internasional merupakan sasaran utama dari diplomasi kebudayaan dengan

harapan pendapat tersebut mampu mempengaruhi pengambil keputusan (Tulus Warsito & Wahyuni Kartikasari, 2007, hal. 4-5).

Diplomasi kebudayaan dalam pelaksanaannya dianggap efektif dalam mencapai suatu tujuan karena diplomasi kebudayaan dapat dilaksanakan dalam situasi apapun, baik itu dalam situasi damai, krisis, konflik, ataupun perang. Melalui kebudayaan, dua negara atau lebih dapat memiliki hubungan yang dekat. Oleh karena itu, beberapa waktu belakangan banyak negara menggunakan diplomasi kebudayaan sebagai alat diplomasi yang efektif.

Dalam buku yang ditulis oleh Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari memaparkan definisi diplomasi kebudayaan sebagai salah satu upaya negara dalam memperjuangkan kepentingan nasional melalui dimensi kebudayaan, baik itu secara mikro seperti ilmu pengetahuan, olahraga, kesenian, dan pendidikan maupun secara makro seperti aksi propaganda dan lain-lain (Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, 2007, hal. 4). Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa aktor yang terlibat di dalam diplomasi kebudayaan dapat dilakukan oleh sektor publik, swasta, maupun individu.

Tujuan yang diciptakan dari kehadiran diplomasi kebudayaan salah satunya dapat menciptakan tempat interaksi dari berbagai macam negara yang melibatkan orang-orang di dalamnya

sehingga tercipta wadah yang berfungsi sebagai sarana untuk menjalin persahabatan dan membentuk koneksi diantara negara-negara tersebut. Diplomasi kebudayaan juga dikenal sebagai suatu cara yang efektif dalam menciptakan jalan komunikasi dibandingkan dengan fenomena-fenomena menegangkan atau konflik yang sedang terjadi. Kehadiran diplomasi kebudayaan dewasa ini faktanya memiliki eksistensi yang penting di dalam tatanan Ilmu Hubungan Internasional. Hal tersebut dibuktikan oleh beberapa tujuan dari diplomasi kebudayaan yang memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan nasional melalui jalur perdamaian.

Tujuan lain yang ditimbulkan melalui kehadiran diplomasi kebudayaan adalah diplomasi kebudayaan menjadi suatu program untuk menarik perhatian masyarakat internasional yang dituju serta memperoleh perhatian dari masyarakat internasional tersebut, dimana hasil dari program diplomasi kebudayaan sulit untuk diukur dan dilihat secara pasti (Mellisen, 2005). Meskipun diplomasi kebudayaan menurut Mellisen tidak dapat diukur dan dilihat secara pasti, diplomasi kebudayaan dalam beberapa kurun waktu belakangan mampu menunjukkan kemampuannya sebagai alat diplomasi yang menjanjikan dan efektif. Diplomasi kebudayaan juga mampu memberikan pengaruh langsung bagi masyarakat internasional. Beberapa konsep nyatanya hadir di dalam sebuah diplomasi kebudayaan. Berikut ini

beberapa konsep yang hadir dalam diplomasi kebudayaan:

**Tabel 1. 1. 3. Hubungan Antara Situasi,  
Bentuk, Tujuan dan Sarana**

**Diplomasi Kebudayaan**

<b>Situasi</b>	<b>Bentuk</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sarana</b>
<b>Damai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksibisi</li> <li>• Kompetisi</li> <li>• Negosiasi</li> <li>• Pertukaran ahli/studi</li> <li>• Konferensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengakuan</li> <li>• Hegemoni</li> <li>• Persahabatan</li> <li>• Penyesuaian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pariwisata</li> <li>• Olahraga</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Perdagangan</li> <li>• Kesenian</li> </ul>
<b>Krisis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Propaganda</li> <li>• Pertukaran misi</li> <li>• Negosiasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persuasi</li> <li>• Penyesuaian</li> <li>• Ancaman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Politik</li> <li>• Diplomatik</li> <li>• Misi tingkat tinggi</li> <li>• Opini Publik</li> </ul>
<b>Konflik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teror</li> <li>• Penetrasi</li> <li>• Pertukaran misi</li> <li>• Boikot</li> <li>• Negosiasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancaman</li> <li>• Subversi</li> <li>• Persuasi</li> <li>• Pengakuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opini Publik</li> <li>• Perdagangan</li> <li>• Para Militer</li> <li>• Forum Resmi Pihak-ketiga</li> </ul>
<b>Perang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetisi</li> <li>• Teror</li> <li>• Penetrasi</li> <li>• Propaganda</li> <li>• Embargo</li> <li>• Boikot</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dominasi</li> <li>• Hegemoni</li> <li>• Ancaman</li> <li>• Subversi</li> <li>• Pengakuan</li> <li>• Penaklukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Militer</li> <li>• Para Militer</li> <li>• Penyelendupan</li> <li>• Opini Publik</li> <li>• Perdagangan</li> <li>• Suply Barang Konsumtif (termasuk senjata)</li> </ul>

Sumber: Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari., "*Diplomasi Kebudayaan Konsep dan Relevansi Bagi Negara Berkembang*". Yogyakarta: Ombak, 2007, Hal 21

Terdapat 5 bentuk dari diplomasi kebudayaan yang dilakukan melalui cara damai, diantaranya :

1. Eksibisi adalah suatu pameran yang dihadirkan untuk menampilkan karya kesenian atau konsep-konsep ilmu pengetahuan, teknologi, maupun nilai-nilai sosial atau ideologi suatu bangsa kepada bangsa lain
2. Kompetisi adalah pertandingan dengan tujuan positif melalui sarana olahraga, kontes kecantikan atau melalui sebuah kompetisi ilmu pengetahuan dan lain-lain.
3. Negosiasi adalah suatu seni mengedepankan komunikasi guna untuk mencapai suatu kepentingan nasional.
4. Pertukaran ahli/studi
5. Konferensi adalah suatu pertemuan atau rapat untuk berunding ataupun bermusyawarah dengan tujuan mencapai sebuah kesepakatan bersama

Berdasarkan penjelasan tabel di atas salah satu bentuk diplomasi kebudayaan melalui cara damai adalah kompetisi. Kompetisi dapat didefinisikan sebagai suatu persaingan atau pertandingan untuk mencapai tujuan positif melalui berbagai macam sarana, yaitu olahraga, kontes kecantikan, ataupun melalui kompetisi ilmu pengetahuan dan lain-lain. Kompetisi tersebut dapat dilaksanakan baik di dalam negeri ataupun luar negeri. Melalui sebuah kompetisi baik dalam tingkat regional maupun internasional beberapa

kali telah membuktikan jika pelaksanaan kompetisi tersebut mampu menarik perhatian masyarakat internasional dan menciptakan berbagai macam upaya perdamaian.

Dalam diplomasi kebudayaan, salah satu sarana yang digunakan melalui upaya damai adalah sektor keolahragaan. Olahraga mengambil peran penting dalam proses diplomasi beberapa negara. Olahraga dan politik bersatu secara bersama. Diplomasi olahraga penting digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi interaksi beberapa negara. Melalui diplomasi olahraga juga dapat dijadikan sebuah alat bagi suatu negara untuk mencapai kepentingan antara beberapa negara. Olahraga mengandung beberapa nilai diantaranya sikap saling menghargai, toleransi, semangat universalitas, dan kerjasama. Kehadiran diplomasi olahraga merupakan bagian dari *soft diplomacy* dimana diplomasi olahraga dapat membawa dan menyebarkan pemikiran baik bagi suatu negara. Penggunaan sarana olahraga menjadi upaya damai yang dilakukan oleh sebuah negara dalam mencapai tujuannya. Melalui sektor keolahragaan, suatu negara dapat menciptakan kompetisi, negosiasi, maupun konferensi sebagai upaya rekonsiliasi suatu negara.

Olahraga sebagai alat diplomasi kebudayaan terbukti sukses dilaksanakan, baik dalam level regional maupun internasional. Seperti yang dijelaskan



sebelumnya bahwa terdapat hubungan erat diantara olahraga dan perdamaian sehingga kemunculan kompetisi olahraga dinilai mampu menciptakan perdamaian. *Mega-event* olahraga salah satunya penyelenggaraan olimpiade merupakan implementasi dari diplomasi kebudayaan. Olimpiade yang berada dalam jenjang internasional menjadi salah satu kompetisi keolahragaan dinilai mampu menarik hati masyarakat internasional. Terbukti pelaksanaan olimpiade beberapa waktu belakangan berhasil menciptakan daya tarik yang besar bagi masyarakat internasional serta menjadi salah satu upaya dalam melakukan perdamaian antara dua negara atau lebih.

Olimpiade Musim Dingin 2018 atau dikenal sebagai *Pyeongchang Winter Olympics* 2018 menjadi salah satu perwujudan dari diplomasi kebudayaan. Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 dapat digolongkan sebagai diplomasi kebudayaan melalui sarana olahraga. Dengan menggunakan Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018, olimpiade tersebut mampu melaksanakan kompetisi keolahragaan internasional dengan melibatkan sembilan puluh dua negara. Selain kompetisi yang hadir dalam pelaksanaan Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018, terdapat pula upaya negosiasi yang dilakukan oleh tuan rumah olimpiade yaitu Korea Selatan. Upaya negosiasi yang dilakukan oleh Korea Selatan

melalui Olimpiade Musim Dingin 2018 adalah mengajak Korea Utara sebagai negara serumpun Korea Selatan untuk ikut bergabung dalam ajang olimpiade tersebut. Pasalnya, di tengah ajakan Korea Selatan terhadap Korea Utara tersebut situasi diantara keduanya sedang mengalami ketegangan. Oleh karena itu, Korea Selatan memanfaatkan moment Olimpiade Pyeongchang sebagai sarana negosiasi sebagai upaya untuk mencapai suatu perdamaian. Upaya yang dilakukan oleh Korea Selatan tersebut berbuah hasil dimana saat Korea Utara setuju untuk turut berpartisipasi dalam olimpiade tersebut dan bergabung dengan Korea Selatan di bawah bendera unifikasi Korea saat pembukaan olimpiade berlangsung. Melalui kompetisi olahraga yang dihadirkan pada olimpiade tersebut Korea Selatan dan Korea Utara bergabung menjadi satu tim dalam pertandingan *hockey*.

### **1. 3. 2. Multitrack Diplomacy**

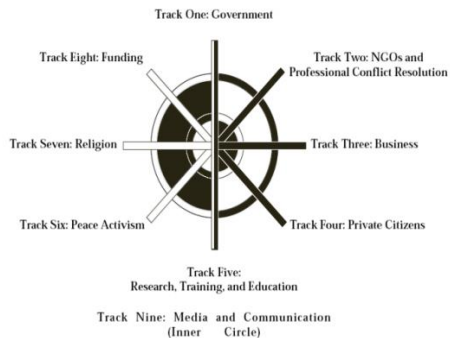
Perkembangan diplomasi sebagai seni dalam melakukan negosiasi dalam kurun waktu ke waktu mengalami perkembangan. Tidak diragukan lagi jika upaya diplomasi menjadi salah satu upaya yang kerap dilakukan oleh negara untuk melakukan perundingan. Perundingan-perundingan tersebut memiliki satu tujuan yaitu untuk mencapai perdamaian. Pada awal perkembangannya, diplomasi yang terjadi banyak dikendalikan oleh negara. Terlebih sebelum Perang Dingin

berlangsung dimana pada era tersebut aktor negara atau *state actor* menjadi aktor utama dalam setiap upaya diplomasi yang terjadi. Negara menjadi aktor yang mendominasi jalannya Hubungan Internasional dan diplomasi untuk mencapai sebuah perdamaian. Pasca berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1989, para pakar internasional melihat jika ada aktor lain yang mampu mewujudkan perdamaian selain pemerintah. Aktor-aktor tersebut dikenal sebagai aktor non-negara atau *non-state actor*.

Konsep Multi-Track diplomasi adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Louise Diamond dan John W.McDonald. Kemunculan konsep ini merupakan perluasan dari konsep yang sebelumnya dijelaskan oleh Joseph Montville pada tahun 1982. Diplomasi multitrack pada awal kemunculannya hanya terdiri dari dua jalur atau track, yaitu track negara dan track non-negara. Pada tahun 1989, McDonald memperluas track dalam diplomasi ini menjadi lima tracks (McDonald J. W., 2003). Tracks atau jalur baru yang diperluas oleh McDonald diantaranya: pemerintah, *conflict-resolution professionals*, kalangan bisnis, *private citizen*, dan media. Setelah memperluas jalur atau tracks dalam konsep diplomasi multi-tracks bersama dengan Diamond, McDonald menambah dua jalur atau tracks pada konsep diplomasi. Berangkat dari hal tersebut, diplomasi multi-tracks yang telah dirancang memiliki sembilan jalur.

Kesembilan jalur yang berada pada konsep *multitrack diplomacy* masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi dalam mewujudkan perdamaian dan ketentraman bagi dunia internasional. Dalam konsep *multitrack diplomacy* kehadiran aktor-aktor diplomasi yang terbagi menjadi sembilan jalur atau track memiliki pengaruh dalam proses diplomasi dan resolusi konflik. Jalur atau *track* dalam diplomasi Multi-Tracks dibentuk dengan desain lingkaran yang saling berhubungan. Desain lingkaran yang menghubungkan antara setiap jalur memiliki makna bahwa setiap jalur memiliki nilai, sumber daya, dan pendekatan yang sesuai dengan masing-masing jalur atau track (Aini, 2019, p. 60). Adapun kesembilan jalur atau track dalam konsep multitrack diplomasi sebagai berikut:

**Gambar 1. 3. 2. Nine Track Wheel System in the Multi Track Approach**



Sumber: (IMTD, 2007)

## **1. Track One Diplomacy: Pemerintah**

Dalam jalur ini sarana yang digunakan menggunakan jalur pemerintahan. Jalur ini menggambarkan bahwa pemerintah memiliki peran dalam proses terciptanya sebuah perdamaian melalui diplomasi. Upaya-upaya resolusi konflik akan dilakukan secara formal dan oleh pemerintah beserta lembaga-lembaga yang menjadi satu kesatuan pada sebuah negara (Dadang Ilham K. Mujiono & Frisca Alexandra, 2019, p. 7). Lembaga tersebut termasuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada jalur ini dilakukan diplomasi-diplomasi secara formal oleh pemerintah sebagaimana mestinya. Jalur pertama pada konsep multitrack diplomasi merupakan jalur yang resmi karena aktor yang terlibat pada jalur ini adalah representasi langsung yang ditunjuk oleh suatu negara. Jalur pertama menggunakan upaya negosiasi, mediasi, resolusi konflik, dan diplomasi sebagai upaya dalam mewujudkan perdamaian global.

## **2. Track Two Diplomacy: Non-Pemerintah / Profesional**

Muncul banyak asumsi jika jalur kedua pada konsep diplomasi ini merupakan lanjutan dari diplomasi jalur pertama. Jalur kedua dilakukan oleh non-pemerintah, profesional atau peacemaker dengan menggunakan cara resolusi konflik. Aksi yang dilakukan oleh non-pemerintah

maupun profesional bertujuan untuk menganalisis, mencegah, menyelesaikan, dan mengelola konflik internasional. Kemunculan jalur kedua ini dinilai mampu membantu menciptakan komunikasi dan negosiasi. Upaya-upaya yang dilakukan melalui jalur kedua untuk menciptakan perdamaian bersifat preventif, penyelesaian, dan menjaga hubungan antar negara. Jalur kedua faktanya memiliki mekanisme tersendiri dalam mewujudkan keberadaannya. Dalam mewujudkan keberadaannya jalur kedua melibatkan banyak aktor non-negara diantaranya: psikolog, kalangan profesional, dan sekelompok yang memiliki pengalaman dalam suatu gerakan sosial.

### 3. **Track Three Diplomacy: Bisnis**

Jalur ketiga melalui bisnis atau *peacemaker* menggunakan perdagangan. Kehadiran perdagangan dianggap mampu menciptakan perdamaian global karena perdagangan memberikan peluang yang besar dalam ekonomi. Perdagangan yang dilakukan oleh kalangan bisnis dinilai memiliki potensi yang besar dalam mewujudkan perdamaian. Misi jalur ketiga yakni memberikan peluang ekonomi melalui perdagangan bagi seluruh pihak sehingga menghindari adanya kesenjangan ekonomi. Melalui perdagangan dan kerjasama

internasional yang dilakukan oleh kelompok bisnis sebagai sarana komunikasi informal diharapkan dapat menciptakan perdamaian.

#### **4. Track Four Diplomacy: Private Citizen**

*Private citizens* atau warga sipil atau *peacemaker* dengan melibatkan pribadi seorang warga negara dalam mewujudkan perdamaian. Kemunculan jalur keempat meyakinkan jika warga negara berhak berkontribusi dalam menciptakan sebuah perdamaian. Cara atau kegiatan yang dilakukan oleh warga negara dilakukan dengan proses diplomasi warga negara. Kegiatan-kegiatan terkait diplomasi warga negara diantaranya: program pertukaran pelajar, kelompok volunteer, organisasi non pemerintah (NGO), dan lain sebagainya. Bentuk diplomasi pada jalur ini dapat dilakukan secara perorangan ataupun berkompok serta masyarakat dapat berpartisipasi di dalamnya dengan melakukan aktivitas yang damai. Kelompok warga sipil melakukan kegiatan berdasarkan idealism masing-masing karena tidak adanya ikatan resmi yang mengikat mereka (Wijayanti, 2020).

#### **5. Track Five Diplomacy: Penelitian, Pelatihan, dan Pendidikan**

Pada jalur kelima perwujudan perdamaian dilakukan dengan cara

pembelajaran berupa penelitian, pelatihan, dan pendidikan. Aktor yang terlibat pada jalur diplomasi ini berasal dari sektor akademisi dan peneliti. Program-program yang ditawarkan pada jalur ini dapat dihubungkan dengan program-program pada perguruan tinggi, pertukaran pemikiran dengan melakukan riset khusus, pelatihan ketrampilan untuk akademisi dan peneliti (negosiasi, resolusi konflik, dan mediasi), dan memberikan fasilitas terhadap pihak ketiga (McDonald J. W., 2012, pp. 67-68). Dalam program pendidikan, pendidikan dilakukan mulai dari taman kanak-kanak sampai jenjang perguruan tinggi dengan memberikan kurikulum yang berfokus pada upaya mewujudkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap HAM (Dadang Ilham K. Mujiono & Frisca Alexandra, 2019, hal. 9).

#### **6. Track Six Diplomasi: Aktivisme**

Aktivisme atau perdamaian melalui jalan advokasi. Aktivist-aktivis pada jalur ini menggunakan advokasi sebagai alat diplomasi dan upaya dalam pencapaian perdamaian. Advokasi yang dilakukan oleh kelompok aktivis pada jalur merupakan strategi khusus dalam memperjuangkan keinginan-keinginan para aktivis. Isu-isu yang kerap dilakukan para aktivis seperti isu keadilan ekonomi, sosial, hak asasi



manusia, pelucutan senjata, dan kelompok-kelompok kepentingan khusus terhadap kebijakan pemerintah.

#### **7. Track Seven Diplomacy: Pemuka Agama**

Diplomasi pada jalur ini berbasis pada komunitas agama. Komunitas agama atau pemuka agama merupakan aktor yang berperan penting terhadap berjalannya proses diplomasi. Komunitas agama atau pemuka dianggap sebagai aktor yang bertindak melalui sebuah keyakinan. Keyakinan komunitas agama tersebut didasari oleh moral, orientasi yang damai, dan bersifat melindungi. Kegiatan yang dilakukan oleh komunitas pemuka agama biasanya berwujud gerakan berdasar moralitas seperti pasifisme, perlindungan, dan tanpa kekerasan. Jalur diplomasi ketujuh ini mempromosikan nilai-nilai positif yang bersifat universal dan merujuk pada kebaikan manusia.

#### **8. Track Eight Diplomacy: Pendanaan / *Funding***

Pendanaan pada sebuah diplomasi dianggap mampu mencapai perdamaian dengan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Aktor pada jalur ini merupakan komunitas-komunitas yang mampu menyediakan pendanaan. Kelompok pada jalur ini kerap dihubungkan dengan kelompok filantropis atau yayasan. Para filantropis sejatinya memiliki tugas

untuk memfasilitasi jalur lain atau aktor-aktor yang sedang terlibat dalam mewujudkan perdamaian. Selain melakukan pendanaan para filantropis juga aktif melakukan kerjasama dengan kelompok lainnya dalam memperjuangkan beberapa isu. Isu-isu yang diperjuangkan seperti isu HAM, kesetaraan gender, dan lingkungan hidup.

#### **9. Track Nine Diplomacy: Komunikasi dan Media atau Informasi**

Dalam melakukan upaya pencapaian perdamaian, jalur kesembilan atau jalur terakhir pada konsep diplomasi menggunakan sarana komunikasi dan media. Jalur kesembilan berfokus terhadap bagaimana media mampu menciptakan sebuah opini publik sehingga mampu menciptakan sebuah perdamaian. Opini publik yang telah terbentuk tersebut kemudian diekspresikan melalui media-cetak, film, video, radio, sistem elektronik, maupun seni (McDonald J. W., 2012, hal. 68). Media seni yang dimaksudkan pada jalur ini seperti musik dan lain sebagainya. Diamond dan McDonald berpendapat bahwa teknologi komunikasi dan informasi memiliki tugas penting untuk memberikan wawasan mengenai resolusi konflik, hubungan internasional, dan perdamaian.

Meredanya ketegangan antara Korea Selatan dan Korea Utara berkat

kehadiran Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 tidak terlepas dari peranan berbagai macam aktor di dalamnya. Perwujudan peranan aktor-aktor yang terlibat di dalam hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara tersebut dapat dipaparkan melalui jalur-jalur diplomasi yang hadir pada *multitrack diplomacy*. Jalur-jalur yang terdapat di dalam diplomasi ini berhasil menurunkan ketegangan antara kedua negara Korea melalui sarana olahraga. Tidak dipungkiri jika jalur pertama, jalur kedua dan jalur keempat pada *multitrack diplomacy* mengambil peran penting pada permasalahan ini.

Jalur pertama pada *multitrack diplomacy* menjadi upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah dan termasuk sebagai wujud upaya diplomasi yang bersifat resmi. Diplomasi pada jalur pertama ini biasanya dilakukan oleh aktor-aktor diplomat, presiden, atau pejabat tinggi pemerintahan. Instrumen yang digunakan oleh aktor-aktor untuk mewujudkan diplomasi pada jalur pertama ialah menggunakan kebijakan luar negeri. Dalam kasus Olimpiade Pyeongchang, pemerintah berperan penuh dalam proses diplomasi. Pemerintah Korea Selatan di dalam *White Paper Diplomacy* Korea Selatan 2018, menyatakan jika salah satu kebijakan luar negeri Korea Selatan adalah memanfaatkan penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 sebagai upaya diplomasi untuk menuntaskan permasalahan nuklir dan mencapai

perdamaian bangsa Korea. Upaya diplomasi Korea Selatan diwujudkan dengan mengajak Korea Utara untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Pyeongchang 2018.

Korea Utara dalam mewujudkan perdamaian Semenanjung Korea melalui olimpiade musim dingin juga melakukan beberapa upaya diplomatik. Pembicaraan diplomatik tersebut menjadi sarana bagi pemerintah Korea Utara untuk mencari cara dalam menurunkan ketegangan antara kedua negara menjelang pelaksanaan Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 (Ward, 2018).

Korea Utara dalam pembicaraan diplomatik tersebut juga mempertimbangkan untuk ikut bergabung dalam ajang olimpiade musim dingin. Pasca pembicaraan diplomatik Korea Utara mengirim beberapa atlet, jurnalis, dan tim cheerleader dalam ajang tersebut. Korea Utara juga mengirim adik Kim Jong Un, Kim Yo Jong untuk hadir dalam pembukaan olimpiade sebagai salah perwakilan negara. Upaya resolusi konflik pemerintah Korea Utara dengan menjadikan Olimpiade Pyeongchang sebagai alat perdamaian didukung oleh Kim Jong Un selaku presiden Korea Utara. Kim mengatakan bahwasanya kedua negara harus melakukan upaya untuk menurunkan ketegangan di Semenanjung Korea untuk menciptakan perdamaian (Heekyong Yang & Josh Smith, 2018).

Jalur kedua pada multitrack diplomasi diwujudkan tanpa melalui jalur

non pemerintahan. Aktor-aktor dalam jalur kedua terdiri dari orang-orang profesional yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu. *International Olympics Comitte* adalah sebuah organisasi yang menyelenggarakan olimpiade-olimpiade internasional setiap empat tahun sekali. *International Olympics Comitte* bermarkas di Lausanne, Swiss. IOC juga memiliki tujuan untuk menciptakan jalinan komunikasi internasional yang baik dan perdamaian antara masing-masing negara. Olimpiade Musim Dingin 2018 menjadi salah satu olimpiade terkenal sepanjang masa karena bersatunya bangsa Korea di tengah ketegangan kedua negara tidak terlepas dari keberadaan IOC.

IOC berperan penting dalam mempersatukan Korea Selatan dan Korea Utara melalui Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018. IOC berupaya keras mengajak Korea Utara untuk bergabung ke dalam olimpiade musim dingin 2018 dengan memberikan janji yang akan menguntungkan Korea Utara. Upaya IOC berbuah manis dan mampu menjangkau Korea Utara untuk ikut berpartisipasi pada olimpiade. Dalam memainkan perannya, IOC memberikan janji kepada Korea Utara berupa penutupan biaya atlet Korea Utara jika mereka bergabung dalam olimpiade musim dingin 2018 (Cevy & Noorzaman, 2020, hal. 26). Peran penting IOC yang tidak dapat diabaikan ialah bagaimana IOC menyetujui permintaan Korea Selatan untuk memberikan kesempatan kepada Korea Utara untuk bergabung dalam

kompetisi olimpiade musim dingin dan bersatunya kedua negara sebagai tim pada perlombaan hoki perempuan.

Masyarakat sipil sebagai aktor jalur keempat dalam multitrack-diplomasi dapat menciptakan perdamaian sebagai upaya dalam mencapai tujuan. Masyarakat sipil diberikan hak penuh untuk turut berkontribusi dalam proses pelaksanaan diplomasi. Kehadiran Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 menjadi wadah diplomasi yang dilakukan oleh jalur ini. Dibuktikan dengan bergabungnya atlet kedua negara baik Korea Selatan dan Korea Utara dalam perlombaan *hockey* perempuan dan dilaksanakannya latihan bersama oleh para atlet kedua negara. Saat pertandingan *hockey* berlangsung, fans Korea yang menonton pertandingan tersebut berkumpul menjadi satu dan meneriakkan kalimat “*We Are One*” yang artinya Kita Adalah Satu dan memakai pakaian dengan gambar bendera unifikasi saat pertandingan *hockey*. Dari sisi Korea Utara, tim cheerleader Korea Utara berhasil memenuhi arena dan beberapa kali meneriakkan kata semangat bagi tim *hockey* perempuan Korea. Kehadiran tim cheerleader asal Korea Utara dipandang berhasil membawa citra baik bagi pemerintah Korea Utara.

#### **1. 4. Hipotesa**

Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 dapat digunakan untuk meredakan ketegangan antara Korea Selatan dan Korea Utara melalui keterlibatan MultiTrack Diplomacy yang

dilakukan pemerintah Korea Selatan dan Korea Utara, *International Olympics Comitte* (IOC), dan warga negara yang dilakukan langsung oleh atlet kedua negara Korea Selatan dan Korea Utara.

### **1. 5. Tujuan Penelitian**

Terdapat sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian dengan judul “Pyeongchang Winter Olympics 2018: Sport Diplomacy sebagai Sarana Perbaikan Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara”. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis ialah mengetahui bahwasanya fenomena Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 memiliki peran penting dalam mengurangi ketegangan hubungan diantara Korea Selatan dan Korea Utara.

### **1. 6. Jangkauan Penelitian**

Berdasarkan topik penelitian yang diangkat oleh penulis, guna menjaga konsistensi penulisan di dalam penelitian, penulis akan membatasi konteks pembahasan agar tidak menyimpang dari topik dan tujuan penelitian. Fokus penulisan dalam penelitian ini meliputi dinamika hubungan Korea Selatan dan Korea Utara, pelaksanaan Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018, dan Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi hubungan Korea Selatan dan Korea Utara mengalami perbaikan.

### **1. 7. Metode Penelitian**

Untuk mencapai tujuan penelitian dan melengkapi data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik

pengumpulan data studi pustaka dengan memanfaatkan data-data sekunder. Data-data sekunder yang dikumpulkan berasal dari buku, jurnal, artikel, media elektronik dan *website*. Penulis juga akan menggunakan metode komparatif atau metode perbandingan dengan membandingkan suatu objek dengan objek lainnya. Perbandingan yang akan diambil oleh penulis ialah kondisi hubungan kedua negara Korea sebelum Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 berlangsung dan kondisi hubungan kedua negara Korea setelah Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 dilaksanakan.

## **1. 8. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini oleh penulis dijabarkan menjadi empat bab, dalam setiap bab masing-masing akan dijelaskan lebih rinci ke dalam bentuk sub bab. Penjelasan masing-masing bab akan memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya, sehingga membentuk penelitian yang sistematis dan runtut. Adapun pembagian pembahasan pada tulisan ini sebagai berikut:

**BAB I**, bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II**, bab ini memuat dinamika hubungan Korea Selatan dan Korea Utara dari waktu ke waktu, latar belakang pelaksanaan Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018, dan pelaksanaan Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 serta dampak pelaksanaan olimpiade.

**BAB III**, bab ini memuat analisis pembahasan tentang faktor-faktor yang



mempengaruhi ketegangan hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara menurun melalui penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018.

**BAB IV**, bab ini memuat penutup pada penelitian yang berisi kesimpulan yang dihasilkan dari analisis data dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya